

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Nasional

Perumusan strategi dan arah kebijakan Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 menggariskan hal-hal sebagai berikut:

a. Norma Pembangunan:

- 1) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- 2) Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
- 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

b. Tiga Dimensi Pembangunan:

1) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

2) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- a. Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
- b. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- c. Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

- d. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- a. Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
- b. Wilayah pinggiran;
- c. Luar Jawa;
- d. Kawasan Timur.

c. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas

Kondisi tersebut antara lain:

- 1) Kepastian dan penegakan hukum;
- 2) Keamanan dan ketertiban;
- 3) Politik dan demokrasi; dan
- 4) Tatakelola dan reformasi birokrasi.

d. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya)

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

b. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan per-luasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

c. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

d. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

e. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

f. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan

lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

g. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

6.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau

Strategi merupakan cara yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sementara itu arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta memperhatikan tahapan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, strategi dan kebijakan jangka menengah nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019.

Sebelum merumuskan strategi, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap *Strenght* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Oportunities* (Peluang) dan *Threath* (Ancaman) atau yang lebih dikenal dengan nama SWOT Analysis. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau lima tahun kedepan berdasarkan hasil diskusi yang melibatkan segenap stakeholder dapat digambarkan secara ringkas dalam matrik sebagai berikut :

Tabel 6.1
Identifikasi SWOT Provinsi Kepulauan Riau

Kekuatan (Faktor Internal)		Kelemahan (Faktor Internal)	
1.	Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar	1.	Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi dengan kinerja penurunan yang melambat dari tahun ke tahun
2.	Potensi pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil yang sangat prospektif	2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi
3.	Potensi industri pengolahan, konstruksi serta pertambangan dan pengalihan yang sangat besar	3.	Kesenjangan antar kelompok wilayah Kabupaten yang tinggi yaitu antara Batam-Tanjung Pinang-Bintan-Karimun dengan Natuna-Anambas-Lingga.

Kekuatan (Faktor Internal)		Kelemahan (Faktor Internal)	
4.	Potensi sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang cukup memadai dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat	4.	Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perhubungan baik darat, laut maupun udara, sehingga konektivitas antarwilayah rendah.
5.	Keunggulan budaya daerah, nilai adat istiadat dan seni budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau	5.	Masih rendahnya kualitas infrastruktur listrik, jaringan komunikasi dan pelayanan air bersih
		6.	SDM bidang pertanian sangat terbatas sehingga produksi pertanian belum mampu menutup kebutuhan pangan daerah
		7.	Kondisi lingkungan hidup yang terdegradasi akibat eksploitasi sumberdaya alam terutama pertambangan
Peluang (Faktor Eksternal)		Ancaman (Faktor Eksternal)	
1.	Dukungan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembangunan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan wilayah terluar Negara Indonesia	1.	Ancaman gangguan keamanan dan kedaulatan pada wilayah terluar yang berbatasan dengan negara tetangga.
2.	Besarnya potensi pemodal yang berpeluang menanamkan investasinya di provinsi Kepulauan Riau dalam memanfaatkan potensi kelautan dan sumberdaya alam lainnya yang cukup tinggi, termasuk dalam pengembangan pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil.	2.	Pelaksanaan komitmen regional MEA, menjadi ancaman terhadap pemasaran produk –produk lokal.
3.	Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sebagai area FTZ, diharapkan dapat menjadi akselerator pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa pelayanan lainnya.	3.	Pelaksanaan komitmen regional MEA, menjadi ancaman terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
		4.	Pesatnya kemajuan teknologi informasi, yang dapat mengancam kelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah dan moralitas masyarakat

Dari tabel tersebut selanjutnya dilakukan analisis untuk memperoleh rumusan alternatif strategi, yaitu upaya memanfaatkan faktor internal positif berupa kekuatan untuk memanfaatkan faktor eksternal positif (peluang) dan memanfaatkan faktor internal positif (kekuatan) menghadapi faktor eksternal negatif (ancaman). Selanjutnya dilakukan analisis pemanfaatan peluang untuk mengurangi atau mengatasi kelemahan yang ada. Hasil analisis tersebut dapat digambarkan dalam bentuk matrik seperti diperlihatkan pada Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2
Matrik Identifikasi Alternatif Strategi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (Faktor Eksternal)</p>	<p>Ancaman (Faktor Eksternal)</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kebijakan Pemerintah (pusat) terkait dengan pembangunan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan wilayah terluar Negara Indonesia 2. Besarnya potensi pemodal yang berpeluang menanamkan investasinya di provinsi Kepulauan Riau dalam memanfaatkan potensi kelautan dan sumberdaya alam lainnya yang cukup tinggi, termasuk dalam pengembangan pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil. 3. Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sebagai area FTZ, diharapkan dapat menjadi akselerator pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa pelayanan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman gangguan keamanan dan kedaulatan pada wilayah terluar yang berbatasan dengan negara tetangga. 2. Pelaksanaan komitmen regional MEA, menjadi acaman terhadap pemasaran produk –produk lokal. 3. Pelaksanaan komitmen regional MEA, menjadi acaman terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. 4. Pesatnya kemajuan teknologi informasi, yang dapat mengancam kelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah dan moralitas masyarakat
<p>Kekuatan (Faktor Internal)</p>	<p>Alternatif Strategi (Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang)</p>	<p>Alternatif Strategi (Kekuatan Untuk Meminimalisir Ancaman)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan intensitas kerjasama dengan pemerintah pusat dalam rangka pembiayaan pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, antara lain dalam pemanfaatan DAK dan sumber dana Kementerian/Lembaga dan lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM dalam pengembangan daerah perbatasan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, terutama terkait dengan pengembangan masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi

<ol style="list-style-type: none"> 2. Potensi pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil yang sangat prospektif 3. Potensi industri pengolahan, konstruksi serta pertambangan dan penggalian yang sangat besar 4. Potensi sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang cukup memadai dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat 5. Keunggulan budaya daerah nilai adat dan seni budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan penanaman modal bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kepri terutama terkait dengan pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil 3. Pengembangan industri, perdagangan dan konstruksi terutama pada wilayah FTZ dalam rangka lebih memicu pertumbuhan perekonomian daerah 4. Akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, lebih kreatif untuk memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah pusat di bidang pembangunan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan wilayah terluar Negara Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia daerah dalam memanfaatkan potensi berkembangnya usaha pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil serta pengembangan usaha perikanan kelautan pada umumnya 3. Pengembangan potensi industri pengolahan, konstruksi serta pertambangan yang kompetitif dan sesuai standar untuk menghadapi ancaman persaingan perdagangan bebas ASEAN. 3. Memperkuat perkembangan budaya daerah nilai adat dan seni budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mengurangi dampak negatif pesatnya kemajuan teknologi informasi 4. Pemanfaatan Pesatnya kemajuan tehnologi informasi, untuk mengembangkan budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keasliannya.
<p>Kelemahan (Faktor Internal)</p>	<p>Alternatif Strategi (Pemanfaatan Peluang Untuk Mengatasi Kelemahan)</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi dengan kinerja penurunan yang melambat dari tahun ke tahun 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan pengembangan potensi perikanan kelautan, industri pengolahan konstruksi dan pertambangan dalam penyerapan tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran 2. Pengembangan potensi perikanan kelautan, industri pengolahan konstruksi dan pertambangan dengan tetap memberikan kesempatan berkembang kelompok usaha mikro , kecil dan menengah guna peningkatan pendapatan masyarakat miskin 	

<p>3. Kesenjangan antar kelompok wilayah Kabupaten yang tinggi yaitu antara Batam-Tanjung Pinang-Bintan-karimun dengan Natuna-Anambas-Lingga.</p>	<p>3. Akselerasi pengembangan potensi perikanan dan pariwisata berbasis kelautan terutama pada wilayah Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga untuk mengurangi kesenjangan antar daerah</p>
<p>4. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perhubungan baik darat, laut maupun udara, sehingga konektivitas antar wilayah rendah.</p>	<p>4. Peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan dengan memanfaatkan potensi pendaan dari Pemerintah dan mendorong tumbuhnya investasi swasta</p>
<p>5. Masih rendahnya kualitas infrastruktur listrik, jaringan komunikasi dan pelayanan air bersih</p>	<p>5. Peningkatan kualitas infrastruktur p listrik, jaringan komunikasi dan pelayanan air bersih dengan memanfaatkan potensi pendaan dari Pemerintah dan mendorong tumbuhnya investasi swasta</p>
<p>6. SDM bidang pertanian sangat terbatas sehingga produksi pertanian belum mampu menutup kebutuhan pangan daerah</p>	<p>6. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM bidang pertanian dalam arti luas untuk memanfaatkan potensi dan meningkatkan produksi sekaligus peningkatan penyerapan tenaga kerja</p>
<p>7. Kondisi lingkungan hidup yang terdegradasi akibat eksploitasi sumberdaya alam terutama pertambangan</p>	<p>7. Peningkatan penegakan peraturan dan penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan lingkungan</p>

Dari matrik identifikasi alternatif strategi tersebut kemudian dilakukan analisis dan dikembangkan untuk memperoleh formula strategi jangka menengah pada masing-masing rumusan misi, sejak misi 1 sampai dengan misi 9. **Rumusan strategi jangka menengah** Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan misi sebagai berikut.

Misi 1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu

1. Memberdayakan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga adat melayu di Provinsi Kepri untuk melestarikan nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.
2. Menerapkan Gerakan Maghrib Mengaji bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan desa/ kelurahan
3. Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan melibatkan linmas, aparat kepolisian dan TNI.

Misi 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembangan sistem manajemen transportasi.
2. Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatkan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah
3. Meningkatkan ketersediaan air irigasi bagi pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan sarana prasarana pengairan
4. Meningkatkan ketersediaan sarana drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan melalui pembangunan dan rehabilitasi.
5. Menurunkan kawasan kumuh perkotaan melalui perbaikan kualitas lingkungan permukiman
6. Mendorong masyarakat untuk berinvestasi di bidang energi baru terbarukan

Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi

1. Pemberian dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga kurang mampu,
2. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah,
3. penguatan peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah yang berkualitas, dan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta memfasilitasi perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan diploma/politeknik sesuai potensi daerah.
4. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga di tingkat nasional dan internasional dengan meningkatkan pembinaan dan pemberian reward.

5. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, dan penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.

Misi 4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Meningkatkan upaya kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, didukung pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana, penerapan standar pelayanan, dan perbaikan manajemen rumah sakit
3. Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta menciptakan pembangunan yang inklusif.
4. Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa.
5. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.
6. Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, serta kerjasama dalam penanggulangan bencana

Misi 5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan

1. Percepatan pengembangan perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap skala kecil, peningkatan sarana dan prasarana budidaya laut, payau, tawar serta pembenihan, dan mengembangkan sarana prasarana pengolahan.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana wisata bahari dengan memberdayakan potensi masyarakat lokal.
3. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak secara berkelanjutan
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pembangunan wilayah perbatasan

Misi 6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur, pelayanan perijinan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi.
2. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dan Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas KUMKM

Misi 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal

1. Meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar
2. Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan.

Misi 8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup

1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, penanganan lahan kritis, [mendorong kabupaten/kota dan swasta dalam pengembangan RTH](#), dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui konservasi.
3. Meningkatkan pengawasan sumberdaya dengan memberdayakan PPNS dan Pokmasmas, serta melakukan pembinaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Misi 9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas

1. Memperbaiki sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem seleksi terbuka secara bertahap
2. Meningkatkan kapasitas aparatur SKPD dalam pelayanan publik, pengelolaan jaringan, dan pemanfaatan aplikasi e-Government lingkup Pemerintah Provinsi.
3. Meningkatkan kunjungan perpustakaan dengan mendorong minat baca, dan memperbaiki layanan perpustakaan
4. Meningkatkan pelayanan persandian pada seluruh perangkat daerah
5. Meningkatkan prestasi dengan menyusun pelaporan pemerintah daerah berbasis kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan melalui integrasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan RPJMD dan RKPD

7. Memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan perpajakan daerah, Mengoptimiliasi pemanfaatan teknologi, meningkatkan koordinasi dana perimbangan pusat dan daerah, meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten/kota.

Kebijakan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan misi sebagai berikut:

Misi 1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya melayu, promosi budaya, pembinaan kesenian dan tradisi lokal, pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (tangible), dan pelestarian warisan budaya tak benda (intangible)
2. Peningkatan penerapan Gerakan Maghrib Mengaji secara serentak di seluruh desa/kelurahan
3. Peningkatan antisipasi potensi gangguan keamanan, penegakan Perda dan Perkada.

Misi 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan dengan prioritas pada penanganan jalan rusak.
3. Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus pada pembangunan dan pengoperasian jaringan irigasi
4. Peningkatan ketersediaan sarana drainase dengan prioritas penanganan pada titik-titik rawan banjir, peningkatan sarana air bersih pada wilayah kekurangan air, dan pengembangan sarana pengolahan air limbah.
5. Peningkatan penataan lingkungan pemukiman dan penyediaan fasilitas umum pada kawasan-kawasan kumuh perkotaan
6. Peningkatan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik

Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi

1. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas akses pendidikan menengah yang berkualitas, dan fasilitasi perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan diploma/politeknik sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja.
2. Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaaan, pembinaan atlet dan pelatih olahraga

3. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis.

Misi 4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas; Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat; peningkatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas, dan peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Pemenuhan sarana dan prasarana, penerapan standar pelayanan, dan perbaikan manajemen rumah sakit sesuai standar rumah sakit Paripurna
3. Peningkatan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
4. Pengembangan perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, pengarusutamaan anak, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal, serta pemenuhan hak anak.
6. Peningkatan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu, serta penanggulangan korban bencana

Misi 5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya serta hasil olahan perikanan, dengan fokus pada: penataan pemanfaatan sumberdaya ikan, pengembangan usaha perikanan tangkap, pengendalian perikanan tangkap, pengembangan usaha budidaya perikanan, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya, pengendalian dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya, bina mutu pemasaran dan promosi perikanan, penyuluhan penguatan usaha, dan diversifikasi produk olahan.
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata dan pemasaran wisata dengan fokus pada pengembangan obyek wisata bahari, wisata MICE dan penyelenggaraan event berskala nasional.
3. Peningkatan pelatihan pelaku agribisnis dan kelompok tani, penerapan teknologi pertanian tepat guna, fasilitasi sarana produksi dan alsintan, dan Peningkatan pembibitan dan pengembangan usaha peternakan, dan pengawasan kesehatan hewan dan penanganan penyakit ternak
4. Peningkatan cadangan pangan, pemantauan harga, distribusi dan keamanan pangan, serta penganeekaragaman konsumsi pangan secara merata di seluruh wilayah.

5. Peningkatan Pengembangan wilayah perbatasan diprioritaskan pada sektor ekonomi, infrastruktur, SDM, dan pelayanan sosial dasar

Misi 6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah

1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di tingkat lokal, regional maupun nasional, dan perbaikan kualitas pelayanan perijinan
2. Peningkatan Kualitas kelembagaan, Peningkatan daya saing SDM, Peningkatan Akses Sumber daya Produktif Pembiayaan dan nilai tambah Pemasaran, Koperasi dan UKM

Misi 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal

1. Pengembangan kawasan industri, teknopark, dan sentra industri potensial berbahan baku lokal terutama industri pengolahan hasil perikanan.
2. Peningkatan upaya promosi dan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, serta
3. pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai.

Misi 8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup, pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, [perluasan RTH](#), dan rehabilitasi di luar kawasan hutan.
2. Peningkatan pengelolaan Kawasan konservasi mandiri dengan fokus pada identifikasi dan penataan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta rehabilitasi dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan
3. Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan fokus pada penertiban usaha kelautan dan perikanan, serta pengendalian perizinan usaha perikanan.

Misi 9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas

1. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat pemerintah Provinsi.
2. Peningkatan penerapan standar pelayanan, pengembangan jaringan teknologi informasi, dan integrasi aplikasi e-government secara menyeluruh agar dapat digunakan secara optimal.
3. Peningkatan minat baca masyarakat dengan prioritas pada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, peningkatan sarana prasarana dan buku perpustakaan.
4. Meningkatkan pelayanan persandian secara bertahap

5. Penyusunan pelaporan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Penyusunan dokumen perencanaan dengan melakukan tahapan proses evaluasi dokumen perencanaan sebelumnya dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, baik dari sisi kebijakan maupun program dan kegiatan
7. Peningkatan intensifikasi pajak daerah, pengembangan aplikasi IT layanan samsat, ekstensifikasi potensi retribusi daerah dan pemanfaatan asset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Keterkaitan strategi dan kebijakan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3
Strategi dan Kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.	Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu guna Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang berkepribadian dan Berakhlak Mulia.	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Memberdayakan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga adat melayu di Provinsi Kepri untuk melestarikan nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya melayu, promosi budaya, pembinaan kesenian dan tradisi lokal, pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (tangible), dan pelestarian warisan budaya tak benda (intangible)
			Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama	Menerapkan Gerakan Maghrib Mengaji bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan desa/ kelurahan	Peningkatan penerapan Gerakan Maghrib Mengaji secara serentak di seluruh desa/kelurahan
		Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kerukunan, dan nasionalisme di masyarakat	Terciptanya lingkungan yang aman, tenteram, tertib dan kondusif serta meningkatnya jiwa nasionalisme masyarakat.	Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan melibatkan linmas, aparat kepolisian dan TNI.	Peningkatan antisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, penegakan Perda dan Perkada.
2	Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Terhubungnya antar pulau dan antar kabupaten/kota di wilayah provinsi	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembangan sistem manajemen transportasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan Provinsi	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatkan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan dengan prioritas pada penanganan jalan rusak.

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian	Meningkatnya fungsi sarana prasarana pengairan (irigasi)	Meningkatkan ketersediaan air irigasi bagi pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan sarana prasarana pengairan	Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus pada pembangunan dan pengoperasian jaringan irigasi
		Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar masyarakat agar dapat hidup secara layak	Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi dan air bersih/minum	Meningkatkan ketersediaan sarana drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan melalui pembangunan dan rehabilitasi.	Peningkatan ketersediaan sarana drainase dengan prioritas penanganan pada titik-titik rawan banjir, peningkatan sarana air bersih pada wilayah kekurangan air, dan pengembangan sarana pengolahan air limbah.
			Meningkatnyakualitas lingkungan permukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan	Menurunkan kawasan kumuh perkotaan melalui perbaikan kualitas lingkungan permukiman	Peningkatan penataan lingkungan permukiman dan penyediaan fasilitas umum pada kawasan-kawasan kumuh perkotaan
			Meningkatnya rasio elektrifikasi	Mendorong masyaarkat untuk berinvestasi di bidang energi baru terbarukan	Peningkatan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik
3	Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.	Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Pemberian dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga kurang mampu, Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, penguatan peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah yang berkualitas, dan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta memfasilitasi perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan diploma/politeknik sesuai potensi	Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas akses pendidikan menengah yang berkualitas, dan fasilitasi perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan diploma/politeknik sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja.

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				daerah.	
			Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga di tingkat nasional dan internasional dengan meningkatkan pembinaan dan pemberian reward.	Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan atlet dan pelatih olahraga
		Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya.	Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja.	Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, dan penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis.
4	Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.	Meningkatnya status kesehatan, gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan upaya kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, didukung pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas; Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat; peningkatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas, dan peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
			Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan	Meningkatkan sarana dan prasarana, penerapan standar pelayanan, dan perbaikan manajemen rumah sakit	Pemenuhan sarana dan prasarana, penerapan standar pelayanan, dan perbaikan manajemen rumah sakit sesuai standar rumah sakit Paripurna
		Menurunkan angka kemiskinan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan	Menurunnya persentase penduduk miskin	Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta menciptakan pembangunan yang inklusif.	Peningkatan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan masyarakat perdesaan	Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa	Pengembangan perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki
		Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marginal serta pemenuhan hak hak anak.
		Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial,	Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, serta kerjasama dalam penanggulangan bencana	Peningkatan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu, serta penanggulangan korban bencana

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
5	Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.	Meningkatkan produksi perikanan, budidaya, perikanan tangkap, dan hasil olahan perikanan	Meningkatnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan	Percepatan pengembangan perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap skala kecil, peningkatan sarana dan prasarana budidaya laut, payau, tawar serta pembenihan, dan mengembangkan sarana prasarana pengolahan.	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya serta hasil olahan perikanan, dengan fokus pada: penataan pemanfaatan sumberdaya ikan, pengembangan usaha perikanan tangkap, pengendalian perikanan tangkap, pengembangan usaha budidaya perikanan, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya, pengendalian dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya, bina mutu pemasaran dan promosi perikanan, penyuluhan penguatan usaha, dan diversifikasi produk olahan.
		Meningkatkan kunjungan wisata baik nusantara maupun mancanegara	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Meningkatkan prasarana dan sarana wisata bahari dengan memberdayakan potensi masyarakat lokal.	Pembangunan Destinasi Pariwisata dan pemasaran wisata dengan fokus pada pengembangan obyek wisata bahari, wisata MICE dan event berskala nasional.
		Meningkatkan Produksi Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak secara berkelanjutan	Peningkatan pelatihan pelaku agribisnis dan kelompok tani, penerapan teknologi pertanian tepat guna, fasilitasi sarana produksi dan alsintan, dan Peningkatan pembibitan dan pengembangan usaha peternakan, dan pengawasan kesehatan hewan dan penanganan penyakit ternak.
		Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh kabupaten/kota	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.	Peningkatan cadangan pangan, pemantauan harga, distribusi dan keamanan pangan, serta penganeekaragaman konsumsi pangan secara merata di seluruh wilayah.

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			masyarakat di seluruh wilayah		
		Meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah perbatasan	Meningkatnya pembangunan wilayah perbatasan	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pembangunan wilayah perbatasan	Peningkatan Pengembangan wilayah perbatasan diprioritaskan pada sektor ekonomi, infrastruktur, SDM, dan pelayanan sosial dasar
6	Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya realisasi investasi domestik dan investasi asing, pelayanan perijinan, serta kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha	Meningkatkan penyediaan infrastruktur, pelayanan perijinan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi.	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di tingkat lokal, regional maupun nasional, dan perbaikan kualitas pelayanan perijinan
		Meningkatkan kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM sebagai usaha ekonomi rakyat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dan Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas KUMKM	Peningkatan Kualitas kelembagaan, Peningkatan daya saing SDM, Peningkatan Akses Sumber daya Produktif Pembiayaan dan nilai tambah Pemasaran, Koperasi dan UKM
7	Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.	Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri berbahan baku lokal	Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal	Meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar	Pengembangan kawasan industri, teknopark, dan sentra industri potensial berbahan baku lokal terutama industri pengolahan hasil perikanan.
			Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan.	Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan.	Peningkatan upaya promosi dan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, serta pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai.

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
8	Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan dan pelestarian hutan, perluasan ruang terbuka hijau dan penanganan lahan kritis secara berkelanjutan	Berkurangnya kerusakan lingkungan, terkelolanya hutan dan laut secara lestari, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan dan berkurangnya lahan kritis secara berkelanjutan.	Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, penanganan lahan kritis, mendorong kabupaten/kota dan swasta dalam pengembangan RTH, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup, pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, perluasan RTH, dan rehabilitasi di luar kawasan hutan.
		Menjaga Kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Lestarnya sumber daya kelautan dan perikanan	Meningkatkan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui konservasi	Peningkatan pengelolaan Kawasan konservasi mandiri dengan fokus pada identifikasi dan penataan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta rehabilitasi dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan
		Menurunnya kasus IUU Fishing	Meningkatkan pengawasan sumberdaya dengan memberdayakan PPNS dan Pokmasmas, serta melakukan pembinaan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan fokus pada penertiban usaha kelautan dan perikanan, serta pengendalian perizinan usaha perikanan.	
9	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur	Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur pemerintah	Memperbaiki sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem seleksi terbuka secara bertahap	Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat pemerintah Provinsi.
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan e-government	Meningkatkan kapasitas aparatur SKPD dalam pelayanan publik, pengelolaan jaringan, dan pemanfaatan aplikasi e-Government lingkup Pemerintah Provinsi.	Peningkatan penerapan standar pelayanan, pengembangan jaringan teknologi informasi, dan integrasi aplikasi e-goverment secara menyeluruh agar dapat digunakan secara optimal.
		Meningkatnya pelayanan perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya kunjungan perpustakaan dengan mendorong minat baca, dan memperbaiki layanan perpustakaan	Peningkatan minat baca masyarakat dengan prioritas pada pelajar, mahasiswa masyarakat umum, peningkatan sarana prasarana dan buku	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
					perpustakaan.
			Meningkatnya tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal)	Meningkatkan pelayanan persandian pada seluruh perangkat daerah	Meningkatkan pelayanan persandian secara bertahap
		Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya prestasi kinerja pemerintah provinsi Kepulauan Riau	Meningkatkan prestasi dengan menyusun pelaporan pemerintah daerah berbasis kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penyusunan pelaporan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan melalui integrasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan RPJMD dan RKPD	Penyusunan dokumen perencanaan dengan melakukan tahapan proses evaluasi dokumen perencanaan sebelumnya dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, baik dari sisi kebijakan maupun program dan kegiatan
		Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), APBD, dan LPP APBD Provinsi dan kabupaten/kota yang tepat waktu dan akuntabel	Memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan perpajakan daerah, Mengoptimisasi pemanfaatan teknologi, meningkatkan koordinasi dana perimbangan pusat dan daerah, meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten/kota	Peningkatan intensifikasi pajak daerah, pengembangan aplikasi IT layanan samsat, ekstensifikasi potensi retribusi daerah dan pemanfaatan asset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah peningkatan dan pengembangn pengelolaan keuangan dan asset daerah

6.3 Arah Pengembangan Wilayah

6.3.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, prioritas pemanfaatan ruang ditekankan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya.
2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat.
3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut.
4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna.

6.3.2 Kerangka Umum Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada tema pengembangan wilayah Sumatera dalam RPJMN tahun 2015-2019, yang sangat terkait dengan Provinsi Kepulauan Riau yaitu: Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional, dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan. Hal ini juga sejalan dengan misi ke-5 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan isu strategis pada masing-masing wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, maupun antar kelompok pendapatan. Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Arah pengembangan wilayah ini juga disusun dengan mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal; serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antar perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Isu utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah masih besarnya kesenjangan antar kabupaten/kota, terutama Kota Batam dengan

kabupaten/kota lain. Dalam kurun waktu tahun 2016-2021, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten/kota yang tertinggal. Akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata.

Kerangka pengembangan wilayah untuk mempercepat pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 19 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelandong, Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Nongsa/Putri) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pengembangan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Provinsi (PKSN) serta percepatan pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat, sehingga terwujud halaman depan negara dan wilayah perbatasan yang mencerminkan NKRI aman, sejahtera, dan antisipatif terhadap perubahan global. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, serta pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri).

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan untuk mengembangkan kawasan strategis nasional agar menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional. Fokus pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan pada pengembangan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; serta menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

2. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna. Pengembangan kawasan strategis provinsi diarahkan pada pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan daya saing provinsi terutama pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan dan energi, didukung pengembangan industri maritim dan penyediaan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota.

3. Pengembangan Kawasan Tertinggal

Pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten yang tertinggal. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan hasil bumi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan.

4. Pengembangan Wilayah Perkotaan

Pengembangan perkotaan diarahkan pada perwujudan kota layak huni yang aman dan nyaman, kota layak anak, kota hijau, serta kota cerdas yang berdaya saing didukung dengan penataan dan pemanfaatan ruang yang baik. Pengembangan wilayah perkotaan juga diarahkan sebagai pusat ekonomi daerah dengan fokus pada pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan, pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Khusus di Kota Batam, Bintan dan Karimun, perkotaan diarahkan pada sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Arah pengembangan wilayah disusun berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah masing-masing kabupaten/kota dengan fokus utama pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat wisata maritim (Wisata Pantai dan Pulau) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna.
2. Pengembangan Pusat wisata budaya dan religi di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang.
3. Pengembangan Pusat perdagangan, jasa, di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
4. Pengembangan pusat produksi perikanan tangkap dan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga.
5. Pengembangan pusat produksi pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya di Kabupaten Lingga.
6. Pengembangan pusat distribusi hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan di Kota Batam.
7. Pengembangan pendukung utama pertahanan dan keamanan nasional di Kabupaten Natuna.

6.3.3 Arah Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/Kota

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per Kabupaten/kota sebagai berikut.

1. Kabupaten Karimun

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun.

Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil produk pertanian padi sawah, hortikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang (contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum berkembangnya budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten Karimun Pulau Moro dan sekitarnya); serta skala produksi olahan perikanan yang masih terbatas (skala rumahtangga) karena keterbatasan modal serta kontinuitas bahan produksi.

Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai

bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan (untuk ciri khas oleh-oleh dari Tanjung Balai Karimun misalnya kerupuk ikan tenggiri). Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: masih luasnya lahan di kawasan Tanjung Balai Karimun namun peruntukan pemanfaatan ruangnya perlu disesuaikan dengan RTRW Kabupaten sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari terkait dengan kawasan FTZ BBK; masih luasnya lahan pertanian terutama di pulau Kundur; masih rendahnya pengolahan hasil produksi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; masih terbatasnya pengetahuan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan pertanian yang relatif kecil di kawasan perkotaan.

Berdasarkan analisis shift share pada sektor ekonomi dan dari survey lapangan, diperoleh hasil bahwa produk unggulan yang terdapat di Kabupaten Karimun adalah: [1] Olahan rumput laut, [2] Olahan buah, [3] Kerupuk ikan, dan [4] Anyaman. Kawasan Industri Berpusat pada kawasan FTZ, hal ini diupayakan agar hasil olahan tersebut dapat langsung dipasarkan, dengan target pasar internasional.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan meliputi komoditas padi sawah, hortikultura, peternakan dan perikanan, didukung dengan industri pengolahan yang berorientasi ekspor, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dengan arah kebijakan:
 - a) Pengembangan pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan sehingga produksi pertanian dapat berorientasi pasar.
 - b) Peningkatan intensifikasi produk hortikultura dan peternakan dengan pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan di perkotaan.
 - c) Perlu didukung sarana dan prasarana produksi yang kontinuitas terkait dengan intensifikasi dan diversifikasi pola tanam.
- 2) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan produk kelautan dengan arah kebijakan:
 - a) Peningkatan pemanfaatan lahan non produktif sebagai lahan budidaya perikanan darat (ikan lele, gurame dan nila).
 - b) Pengembangan budidaya perikanan laut dengan sistem jaring apung atau keramba didukung pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontinyu.
 - c) Intensifikasi produk perikanan air tawar maupun laut serta produk olahannya di kawasan minapolitan.

- 3) Mengembangkan industri manufaktur unggulan berorientasi ekspor.
- 4) Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik (pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat.
- 5) Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- 6) Mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas pelabuhan bebas.

2. Kabupaten Bintan

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam; Sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat. Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan.

Potensi yang dimiliki meliputi budidaya ikan kerapu dan produk budidaya ikan dengan keramba baik dilakukan secara individual maupun kelompok. Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu kualitas bibit yang masih rendah, dan penjualan produk bergantung pada pedagang ikan sehingga harga jual rendah. Produk unggulan di Kabupaten Bintan adalah: [1] Produk budidaya laut, [2] Kerajinan. [3] Produk pertanian hortikultura, dan [4] Produk olahan makanan. Di Kabupaten Bintan terdapat kawasan industri besar, sedang dan kecil, seperti industri pengolahan makanan dan minum, peralatan kendaraan bermotor dan yang lainnya. Luas kawasan industri ini sekitar 3.997 hektar.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan meliputi komoditas budidaya laut, Kerajinan, pertanian hortikultura, dan produk olahan makanan, mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan, serta pengembangan pusat perdagangan dan jasa.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya khususnya ikan kerapu dan jenis ikan lainnya dengan sistem keramba didukung pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontinyu.

- 2) Mengembangkan industri-industri pengolahan perikanan menjadi produk bernilai tambah tinggi.
- 3) Mengembangkan industri manufaktur unggulan berorientasi ekspor.
- 4) Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik (pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat.
- 5) Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

3. Kabupaten Natuna

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kabupaten Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia dikelilingi Laut Cina Selatan merupakan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka-Singapura-Phillip) karena jalur pelayaran internasional ini berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Untuk menangkap dan menjawab permasalahan di jalur internasional tersibuk Selat Malaka-Singapura-Filipina yang sempit, dangkal, berbelok-belok, ramai, dan terbatas, maka jalur pelayaran ALKI I-A di Laut Cina Selatan menjadi alternatif karena merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hingga gugus Pulau Bunguran yang dilewati kapal-kapal internasional. Kabupaten Natuna ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi karena memiliki peluang bagi aktivitas pelayaran internasional, dimana Ranai menjadi lokasi Pengembangan Pemantapan Pelabuhan Nasional.

Kabupaten Natuna mempunyai potensi yang sangat besar dalam sub sektor perikanan, baik perikanan tangkap atau budidaya. Potensi ikan meliputi kerapu napoleon, kakap merah dan kerap turis dengan sentra produksi berada di Pulau Tiga. Pembeli ikan napoleon berasal dari Negara Hongkong yang datang ke Kepulauan Riau. Potensi perikanan yang dimiliki sangat besar namun daya tangkap yang diperoleh masih rendah. Hasil ini disebabkan: nelayan masih banyak menggunakan kapal ≤ 5 GT, infrastruktur TPI belum ada, Bea cukai dan karantina belum ada, Belum ada pasar pelelangan, Akses modal berasal dari Bansos, yaitu: PNPM dan KUM, dan Masalah infrastruktur listrik, transportasi udara dan perhubungan laut. Selain permasalahan tersebut, alat tangkap tidak memadai, belum adanya kemitraan dengan nelayan, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan nelayan dalam pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, dan keterbatasan akses modal.

Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Produk pertanian padi tadah hujan dan sawah terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Utara dan selasar Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha, yang digunakan baru seluas 470 Ha. Untuk hortikultura (durian, rambutan dan mangga) produksinya cukup tinggi, dengan produk olahan berupa lempok (dodol) yang sudah dipasarkan ke Batam. Untuk perkebunan, produk unggulan lokal yang dimiliki berupa cengkeh, kelapa, dan karet. Untuk cengkeh sudah dipasarkan ke Jawa Timur oleh penampung lokal, sedangkan karet sudah

dipasarkan sampai Kalimantan. Produk unggulan yang ada yaitu tikar pandan yang terdapat di Kecamatan Serasan dengan pemasaran sampai ke luar negeri. Pemasaran rotan sudah sampai di Kota Batam. Potensi perkebunan lainnya adalah kembang semangkok yang terdapat di Gunung Ranai.

Permasalahan yang dihadapi dibidang pertanian antara lain: masih belum termanfaatkan luas lahan untuk pertanian di Kabupaten Natuna; nilai tambah hasil pertanian yang masih rendah, terbatasnya akses pemasaran yang terkendala infrastruktur transportasi. Permasalahan lainnya yaitu alat produksi yang masih konvensional, belum adanya kemitraan dengan pihak lain, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan, dan keterbatasan akses modal.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan perikanan tangkap, dan pusat industri nasional, didukung simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, dan kawasan perindustrian terpadu untuk menjadi pusat pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kawasan sesuai dengan Masterplan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna;
- 2) Mengembangkan infrastruktur secara berkelanjutan untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan yang diarahkan pada simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global, internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global;
- 3) Mengembangkan pelabuhan transit pelayaran internasional dan pusat pelayanan akses pasar global;
- 4) Mengembangkan fasilitas pada alur pelayaran internasional yang melewati Kabupaten Natuna meliputi tempat Bunkering BBM dan STS Oil.
- 5) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan produk kelautan dengan arah kebijakan:
 - a) Pengembangan budidaya perikanan laut (terutama kerapu napoleon, kakap merah dan kerapu turis) dengan sistem jaring apung atau keramba didukung pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontinyu.
 - b) Intensifikasi produk perikanan air tawar maupun laut serta produk olahannya di kawasan minapolitan.

- c) Pengembangan industri pengolahan perikanan menjadi produk bernilai tambah tinggi.
- d) Peningkatan akses permodalan bagi nelayan, baik melalui bansos, koperasi, lembaga keuangan bank dan non bank.
- 6) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dengan arah kebijakan:
 - a) Pengembangan pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan sehingga produksi pertanian dapat berorientasi pasar.
 - b) Peningkatan intensifikasi produk hortikultura dan peternakan dengan pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan di perkotaan.
 - c) Perlu didukung sarana dan prasarana produksi yang kontinuitas terkait dengan intensifikasi dan diversifikasi pola tanam.

4. Kabupaten Lingga

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumber daya air yang melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut antara lain untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga sangat besar untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan masih rendah.

Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Jumlah penduduk di Kabupaten Lingga setiap tahun semakin bertambah. Dari 91.600 jiwa penduduk Kabupaten Lingga pada tahun 2008, potensi tenaga kerja yang berpeluang untuk diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan sebanyak 18.786 jiwa yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebagai petani dan buruh.

Kabupaten Lingga dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada peri-peri Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut.

Adapun permasalahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Lingga antara lain: praktek budidaya (bibit lokal) dan pengelolaan lahan perkebunan yang masih sangat sederhana; sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan yang masih sangat terbatas; dan Kelembagaan pertanian belum memasyarakat dan berkembang.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Kabupaten Lingga ditujukan sebagai Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) Bunda Tanah Melayu yang berfungsi sebagai Lumbung Pangan Provinsi Kepulauan Riau, yang mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan pada zona kawasan pertanian Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga meliputi Desa Bukit Harapan, Desa Bukit Langkap, Desa Kerandin dan Desa Linau.
- 2) Meningkatkan produksi perikanan dengan mengoptimalkan eksploitasi pada zona Kawasan tangkap terdapat pada seluruh perairan Kabupaten Lingga, dan pengembangan budidaya pada zona Kawasan Perikanan budidaya meliputi Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep Selatan.
- 3) Melestarikan fungsi lindung pada kawasan resapan air dan mata air untuk menjaga tatanan hydro-orologi di kawasan ini.
- 4) Mengembangkan infrastruktur secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan pertanian.
- 5) Mengembangkan budidaya pertanian yang mempunyai resiko minimum terhadap penurunan kuantitas dan kualitas lingkungan.
- 6) Meningkatkan kapasitas dan keterampilan SDM pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan perikanan.
- 7) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan Kawasan Strategis di Kabupaten Lingga.

5. Kabupaten Kepulauan Anambas

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan dan kelautan dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang bersifat pulih, sehingga ketersediaan potensi perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perikanan tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan.

Kabupaten Kepulauan Anambas juga kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja; Obyek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air Terjun Temurun Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja;

Wisata bahari dan minat khusus seperti di Pulau Kelong. Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, Pulau Punjong, Pulau Bawah, Pulau Tukong, Pulau Semut, Pulau Berhala, Pulau Rengek, Pulau Langok, Pulau Tukong Berlayar, Pantai Melang, Pantai Kusik, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan Pulau Pahat.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah khususnya di bidang pariwisata, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan Industri Pengolahan Hasil Perikanan dengan konsep kawasan perikanan terpadu, didukung dengan Pelabuhan Check Point, dan simpul transportasi udara dan laut sehingga tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas di Kepulauan Anambas.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan dan pariwisata bahari, yang diarahkan pada beberapa zona pemanfaatan dan perlindungan meliputi :

- 1) Zona pariwisata khususnya untuk kegiatan wisata bahari terletak di Pulau Durai, Pulau Penjalin, Pulau Pahat, Pulau Langok, Pulau Selat Rangsang, Pulau Bawah, Pulau Nonse, Pulau Kiabu, Pulau Mengkait, Pulau Telaga, Pulau Jemaja, Pulau Siantan (Tarempa), Pulau Mangkai dan pulau terdepan yang merupakan kawasan konservasi;
- 2) Zona perlindungan terhadap terumbu karang berada di seluruh perairan Kepulauan Anambas;
- 3) Zona perikanan tangkap terdapat hampir di seluruh perairan Kepulauan Anambas;
- 4) Zona Perikanan Budidaya, terbagi atas : Kawasan budidaya perikanan keramba jaring tancap yang terletak di Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk dan Dusun Lidi Kecamatan Siantan Tengah, Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan, Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur, Desa Tebang Ladan, Desa Candi dan Desa Piabung Kecamatan Palmatak; Kawasan budidaya rumput laut berlokasi di Desa Air Sena dan Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah, Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur, Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan, Desa Ladan dan Desa Bayat Kecamatan Palmatak , Letung Kecamatan Jemaja dan Desa Genting Pulus dan Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur.
- 5) Kawasan perikanan terpadu di Teluk Rambut dan Kecamatan Siantan Selatan.

- 6) Industri Pengolahan Hasil Perikanan terletak di Letung Kecamatan Jemaja, Desa Bayat Kecamatan Palmatak dan Dusun Antang Kecamatan Siantan.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan pengembangan simpul transportasi udara dan laut sehingga tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas di Kepulauan Anambas, meliputi pengembangan bandar udara, terminal ferry dan terminal angkutan darat yang terletak di Palmatak.
- 2) Mengembangkan sumber daya energi alternatif yang bersumber dari energi arus pasang surut air laut, terutama di alur celah antar pulau yang mempunyai kecepatan arus yang cukup besar, serta sumber energi alternatif dari sumber angin dan tenaga surya.
- 3) Mengembangkan Pelabuhan Check Point di Kabupaten Kepulauan Anambas (Tarempa) guna mempermudah akses wisatawan luar negeri terhadap pariwisata di Kepulauan Anambas.
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana yang menghubungkan akses sentra-sentra produksi perikanan, pelabuhan laut dan pariwisata;
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana yang menghubungkan akses sentra-sentra produksi perikanan, pelabuhan laut dan pariwisata;
- 6) Melakukan pembinaan SDM terhadap pengelolaan budidaya perikanan dan hasil perikanan tangkap dan budidaya;
- 7) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas.

6. Kota Batam

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk menjadikan Kota Batam sebagai pusat pelayanan perkotaan bagi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, mencakup pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam dan kawasan perbatasan, namun juga lingkup regional, nasional, dan internasional, sesuai arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Pada Pusat Kota dikembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain), serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
2. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, dilakukan peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing.
3. Pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistik setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi "pelabuhan internasional hub" (hub international port).
4. Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di Pulau Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis di Pulau Rempang dan/atau Galang.
5. Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (flyover), simpang susun (interchange), jalan lintas bawah (underpass), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air.
6. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi,

jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman.

7. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, tamankota, taman lingkungan, bumi perkemahan dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30 % dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;
8. Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan.

7. Kota Tanjung Pinang

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di sekitar permukiman pinggiran kota masih ada menjadi peluang untuk peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian hortikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota arah Kijang, Senggarang dan pulau Dompok yang belum optimal, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan produktif di perkotaan.

Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin. Produk unggulan yang terdapat di Kota Tanjungpinang adalah: [1] Sotong, [2] Sotong kering, [3] Bordiran jilbab, [4] Kue dram-dram.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, dan sentra usaha mikro kecil dan menengah, yang didukung sistem transportasi darat, laut dan udara yang terintegrasi.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang menjadi salah satu kawasan strategis Provinsi berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2007

tanggal 2 Februari 2007 tentang Penetapan Lokasi Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan MoU antara DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MoU/I/2007 tanggal 6 Januari 2007. Secara keseluruhan pengelolaan Istana Kota Piring menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, baik penggunaan lahan, bentuk fisik dan fungsi kegiatan yang ada di pulau tersebut, sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Diharapkan dengan ditetapkannya Pulau Dompok sebagai Kawasan Strategis Provinsi akan dapat mendukung fungsi Kota Tanjungpinang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat menggerakkan pertumbuhan kawasan-kawasan sekitarnya.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Pulau Dompok sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Rencana Induk (Masterplan) Istana Kota Piring yang dibagi menjadi beberapa zona antara lain:
 - a. Zona Perkantoran Pemerintah;
 - b. Zona Perdagangan (Bisnis) dan Jasa;
 - c. Zona Pariwisata, Rekreasi dan Olahraga dan Budaya;
 - d. Zona Pemukiman (Pendopo, Rumah Jabatan, Perumahan 1, 2 dan 3);
 - e. Zona Pelayanan Umum (Mesjid, Medical Centre, Kampus, Terminal Ferry);
 - f. Zona Revitalisasi Kawasan Penduduk Asli/Nelayan;
 - g. Zona Pelestarian Lingkungan dan Ruang Terbuka (Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalan, Plaza Utama).
2. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi massal perkotaan secara terintegrasi dan terhubung dengan jaringan transportasi laut dan udara.
3. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang mampu mengakomodasi pasar tradisional, termasuk kegiatan koperasi dan Usaha mikro kecil Menengah (UMKM).
4. Mengembangkan sentra industri pengolahan dan kerajinan menjadi produk khas Kota Tanjungpinang.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ruang yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan.